



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 13 (Tiga belas)
Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN, Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan Direktur Utama PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/Indonesia RE.
Hari, Tanggal	: Rabu, 20 September 2023
Pukul	: 11.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Aria Bima/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan Mengenai : <ol style="list-style-type: none">1. Pendalaman Usulan PMN Tahun 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi;2. Hutang Pemerintah kepada BUMN (PT. PLN).
Hadir	: <ol style="list-style-type: none">1. 20 Orang dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI;2. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN, Bapak Darmawan Prasodjo;3. Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, Bapak Frans Marganda Tambunan; dan4. Direktur Utama PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/Indonesia RE, Bapak Benny Waworuntu. <p>Beserta jajaran.</p>

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN, Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan Direktur Utama PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/Indonesia RE, pada pukul 11.11 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 20 September 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait usulan PMN dari cadangan investasi TA 2024 sebesar Rp5,86 Trilyun untuk menjalankan program Listrik Desa bagi 2.097 desa dengan menggunakan *Digital System Planning* yang berbasis pada geospasial, sehingga target 100% Rasio Desa Berlistrik (RDB) dan Rasio Elektrifikasi (RE) Desa terutama untuk daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dapat tercapai secara efektif, efisien, bertanggungjawab dan berkeadilan.
2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait dengan Posisi Hutang/Piutang Subsidi Listrik dan Kompensasi sebesar Rp60,66 Trilyun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Subsidi Listrik Tahun 2022 yang telah diaudit BPK dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp4,67 Trilyun;
 - b. Kekurangan pembayaran Subsidi Listrik Tahun 2023 s.d Bulan Agustus sebesar Rp5,82 Trilyun;
 - c. Kompensasi Tahun 2023 s.d Bulan Agustus 2023 sebesar Rp50,16 Trilyun.Dengan demikian mendorong pemerintah untuk segera melakukan pelunasan pada tahun 2023.
3. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ IDFood terkait usulan PMN dari cadangan investasi TA 2024 sebesar Rp832 Milyar untuk memperkuat ekosistem pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan nasional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengadaan fasilitas *cold storage* kapasitas 5000 Ton untuk memperpanjang umur simpan cadangan daging ruminansia dan unggas sebesar Rp201 Milyar;
 - b. Revitalisasi pabrik dan penguatan rantai pasok tebu Jawa Timur sebesar Rp631 Milyar.
4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/IndonesiaRe terkait usulan PMN dari cadangan investasi TA 2024 sebesar Rp1 Trilyun untuk penguatan struktur permodalan dengan cara:
 - a. Pengembangan bisnis secara organik melalui: optimalisasi penyerapan bisnis dalam negeri yang profitable dan melakukan ekspansi ke pasar global dengan prinsip kehati-hatian;
 - b. Pengembangan bisnis secara inorganic melalui aksi korporasi (*spin-off*) dan kerja sama dengan *strategic investor*.
 5. Pendalaman dan masukan seluruh anggota Komisi VI DPR RI dalam RDP dengan PT PLN (Persero), IDFood dan IndonesiaRe menjadi bahan pembahasan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI dalam pembahasan alokasi Penyertaan Modal Negara Anggaran Tahun 2024.
 6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT PLN (Persero), IDFood dan IndonesiaRe untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan:

Komisi VI DPR RI menilai PMN Tahun Anggaran 2023 untuk PT PLN (Persero) terkait Listrik Desa sebesar Rp10 Triliun harus tetap dicairkan sejalan dengan UU APBN Tahun 2023 dan Kesimpulan Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI terkait dengan Listrik Desa dan RDP Komisi VI DPR RI pada tanggal 4 Juli 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.52 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO)/PLN**

Ttd.

DARMAWAN PRASODJO

**DIREKTUR UTAMA
PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
(PERSERO)/ID FOOD**

Ttd.

FRANS MARGANDA TAMBUNAN

**DIREKTUR UTAMA
PT. REASURANSI INDONESIA UTAMA
(PERSERO)/INDONESIA RE**

Ttd.

BENNY WAWORUNTU

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

ARIA BIMA.
A-189